

## Analisis Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Persepsi Wajib Pajak Sesudah Diberlakukannya Insentif PKB Selama Pandemi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangli

Ni Komang Ayu Indah Widiantari, Ni Luh Gede Erni Sulindawati

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

\*indahwidia204@gmail.com

### Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:  
15 Juli 2022

Tanggal diterima:  
25 November 2022

Tanggal dipublikasi:  
31 Desember 2022

**Kata kunci:** pendapatan, persepsi, insentif, Pendapatan daerah

### Pengutipan:

Widiantari, Ni Komang Ayu Indah & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni (2022). Analisis Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Persepsi Wajib Pajak Sesudah Diberlakukannya Insentif PKB Selama Pandemi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangli. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (3), 647-654.

**Keywords:** income, perception, incentive, regional income

### Abstrak

Pandemi virus corona atau Covid 19 di tahun 2020 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Dampak yang terjadi hampir disemua sektor, salah satunya adalah sektor perpajakan. Akibat dampak ini, banyak kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk menangani dampak yang terjadi di masa pandemi Covid 19 di tahun 2020. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggapi dampak pandemi Covid 19 yaitu kebijakan insentif pajak terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan Pemerintah Daerah berupa kegiatan sosialisasi melalui media cetak, dan non cetak, pelayanan pajak keliling melalui Bus Samsat, pembayaran melalui e-samsat di ATM Bank Bangli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi Covid 19 mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak yang terutang sehingga dapat meningkatkan penerimaan.

### Abstract

*The Covid-19 pandemic in 2020 had a major impact on the economy. The impact that occurs in almost all sectors, on of which is the tax sector. As a result of this impact, many policies were made by the government to deal with the impacts that occurred during the Covid 19 pandemic in 2020. One of the government's policies in responding to the impact oh the Covid 19 pandemic is the tax incentive policy on Motor Vehicle Taxes. Local government policies are in the form of socialization activities through print and non-print media, mobile tax services via the Samsat Bus, payments via e-samsat at Bank Bangli ATMs. The results of the study indicate that the provision of Motor Vehicle taxpayers in paying taxes owed so as income, perception, incentive, regional income to increase revenue*

### Pendahuluan

Pembangunan dianggap sebagai suatu kegiatan yang ada pada daftar kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memunculkan maksud dan tujuan guna menimbulkan terjadinya peningkatan kecerdasan pada aspek kehidupan bangsa dan guna agar para rakyat menjadi sejahtera dengan dilakukannya kegiatan ini dengan secara adil, dengan secara makmur dan dengan secara merata. Diketahui bahwa yang menjadi sumber dana dalam melakukan proses kegiatan pembangunan ini berasal dari aspek tunjangan keuangan kas Negara yang cukup. Sumber penerimaan kas Negara terbesar bersumber dari penerimaan pajak yaitu sebesar 70%. Seperti yang kita ketahui pajak merupakan iuran wajib masyarakat terhadap Negara yang dalam kondisi ini memunculkan sifat untuk memaksa secara halus dengan berlandaskan pada sebuah peraturan Undang-Undang yang telah berlaku atau telah ditetapkan sebelumnya dengan jelas dan tanpa dalam kondisi ini memperoleh adanya timbal balik yang diperoleh dengan secara langsung.

Pajak diketahui telah memiliki sebuah fungsi-fungsi yang sangat memiliki peran yang begitu sangat esensial dalam memberikan dukungan pada kehidupan suatu Negara sebab dalam hal ini pajak dianggap sebagai salah satu yang dinilai menjadi sumber sebuah

pendanaan yang dianggap kontribusinya berada dalam urutan terbesar oleh Pemerintah. Pajak memunculkan perannya dalam memberikan sebuah dorongan pada proses pertumbuhan yang terjadi pada aspek ekonomi dan mampu melakukan perluasan pada kegiatan yang bersifat ekonomi pada berbagai macam jenis sektor. Berlandaskan uraian pendapat dari Susilawati dan Budiarta yang dianggap salah satu pajak dengan mampu memunculkan potensi atau memunculkan peluang pada penerimaan dengan kontribusi terbesar ialah pada aspek sektor pajak kendaraan bermotor ialah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan jenis pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang terjadi pada 2016 (Ninla Elmawati Falabiba, 2019). Jenis kategori pajak Kendaraan Bermotor ialah dianggap sebagai sebuah pajak atas kepemilikan dan atau dianggap sebagai sebuah pajak penguasaan kendaraan bermotor.

Diketahui dalam kondisi ini Pajak akan mengalami sebuah kondisi peningkatan dengan seiring dengan banyaknya jumlah kepemilikan atas kendaraan bermotor sebagai akibat atas dari terjadinya kondisi peningkatan yang telah timbul dalam aspek ekonomi yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Kondisi yang terjadi ini mampu untuk dilihat dan mampu untuk dicermati pada sebuah lembaga Badan Pusat Statistik bahwa angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia sangat tinggi sebesar 136,32 juta unit kendaraan bermotor di Indonesia. Terlihat dengan kondisi begitu pesatnya kondisi terjadinya penambahan pada banyaknya jumlah jenis kendaraan bermotor yang dalam kondisi ini secara khususnya dengan kategori milik pribadi, sehingga dengan kondisi tersebut, maka tanpa memungkinkan tanpa sebab masyarakat yang ada dalam kondisi ini dinilai sangat memerlukan sebuah transportasi yang mampu memunculkan kondisi efisien, mampu memunculkan kondisi praktis, dan mampu memunculkan kondisi tentunya murah. Berdasarkan data (Kepolisian Republik Indonesia, 2022) bahwa salah satu kota dengan jumlah kendaraan terbanyak adalah Bali yang memasuki peringkat 6 besar tingginya angka kepemilikan kendaraan yaitu dengan jumlah sebanyak 4.324.910 unit kendaraan.

Pentingnya sumber pendapatan daerah karena salah satu faktor pendukung pembangunan nasional adalah kemandirian dari daerahnya melalui kemandirian-nya dalam menggali potensi pendapatan daerah. Dalam kondisi ini maka Pemerintah telah melakukan proses pada berbagai macam jenis upaya-upaya, yang dimana yang menjadi salah satu jenis upaya-upaya yang mampu untuk dilakukan oleh bagian Pemerintah Daerah guna melakukan sebuah peningkatan pada PAD ialah dengan cara atau dengan dengan adanya strategi dengan cara melakukan peningkatan pada aspek penerimaan Pajak Daerah dengan cara melalui proses adanya kegiatan pemungutan pajak yang prosesnya dilakukan secara efektif dan yang prosesnya dilakukan secara efisien dengan adanya pemberian sebuah kontribusi yang mampu terjadinya peningkatan terhadap PAD dan mampu dalam kondisi ini merealisasikan sebuah pencapaian dari target yang sudah ditentukan sebelumnya lewat bagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sehingga dengan kondisi yang terjadi maka lembaga Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah lewat sebuah kantor bersama Samsat melakukan sebuah jalinan kerjasama dengan cara melakukan proses kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor, dengan adanya upaya-upaya yang secara terus menerus dilakukan dalam maksud melakukan peningkatan pada aspek penerimaan dari tahun menuju ke tahun selanjutnya.

Kepatuhan yang terjadi pada wajib pajak sangatlah berpengaruh karena ini merupakan strategi dalam sebuah upaya-upaya dalam maksud melakukan peningkatan pada aspek penerimaan Negara dari aspek sektor jenis pajak. Namun dibalik semua itu ada banyak aspek faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada aspek ketidakpatuhan yang muncul dari sikap para wajib pajak dalam proses menjalankan kewajibannya sehingga tidak optimalnya kinerja pemerintah dalam pelaksanaan di dunia perpajakan. Salah satu faktor penghambat saat ini adalah pandemi covid-19. Selain itu, yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah faktor individu, ekonomi, dan sosial, serta persepsi wajib pajak yang berbeda-beda. Dalam kondisi ini ditemukan adanya solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut, dimana salah satunya dari akibat yang memunculkan terjadi kondisi dari adanya sebuah kondisi pandemi covid-19, maka pemerintah mengeluarkan sebuah insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk menerima pendapatan walaupun pemerintah tahu dan tidak ingin

memaksakan masyarakat di tengah masa kesulitan tetapi ini tetap untuk dijalankan untuk tetap menyadarkan masyarakat.

Berkaitan dengan adanya pemberian pada insentif Pemerintah Provinsi Bali dengan telah mengeluarkan peraturan jenis pajak kendaraan bermotor yang telah selaras Pergub No. 21 tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan cara memberikan sebuah pemberian insentif terkait adanya sebuah pembebasan sanksi administrasi yang dalam kondisi ini diberikan kepada semua kalangan masyarakat yang dinilai sebagai wajib pajak yang dalam kondisi masih muncul adanya tunggakan pada pembayaran yang dilakukannya pada pajak kendaraan bermotor tahunan yang dimana dalam kondisi ini tidak untuk jenis kendaraan bermotor yang dalam kondisi baru (Peraturan Gubernur Bali, 2021). Tujuan atau yang menjadi maksud adanya pemberian insentif ini, dimana agar masyarakat mampu dalam kondisi ini memperoleh sebuah keringanan dan agar masyarakat mampu memperoleh dorongan atas rasa sadar yang muncul dalam diri masyarakat yang dinilai menjadi wajib pajak guna melakukan proses pembayaran pajak dalam rangka melakukan sebuah peningkatan pada aspek PAD.

### **Metode**

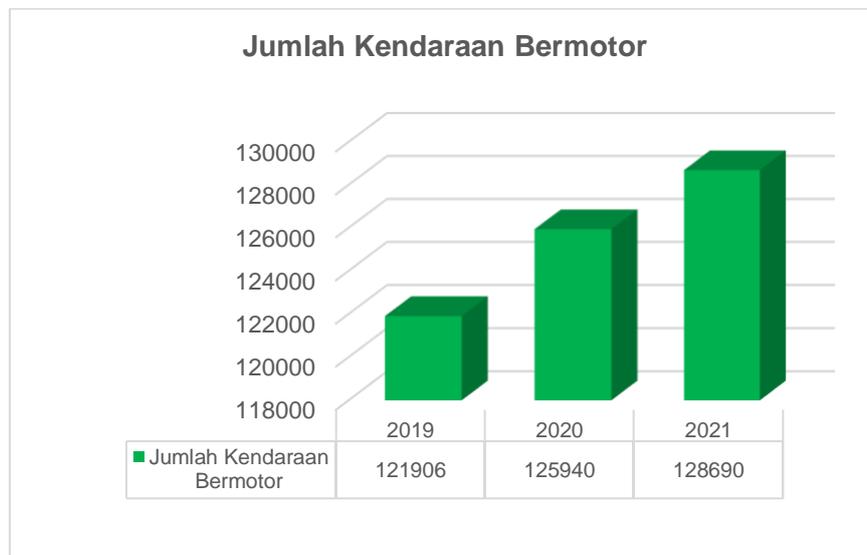
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan artian bahwa sebuah metode yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang tidak dapat diukur dengan angka. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Tempat penelitian ini dilakukan di Samsat Dinas Pendapatan Kota Bangli yang beralamat di Jl. Lettu Lila No. 1, Kawan, Bangli. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penggunaan sumber data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian.

Diketahui bahwa informan dalam penelitian ini adalah pada pelaku yang terikat langsung yaitu pimpinan bagian kasi pelayanan dan pengelola pendaftaran pendapatan pajak dan retribusi dari kantor Samsat kota Bangli dan informan utama dalam membrikan dukungan pada proses penelitian ini ialah beberapa masyarakat yang dinilai sebagai Wajib Pajak (WP) yang masuk ke dalam data di kantor Samsat yang tepatnya berada di kota Bangli. Guna memperoleh sebuah data yang mampu memunculkan sifat secara relevan dan mampu memunculkan sifat secara lengkap, maka pihak peneliti mengimplementasikan beberapa macam teknik yang mampu untuk diterapak guna mendukung proses dalam mengumpulkan data. Pihak peneliti telah mengandalkan proses pengumpulan data dengan menerapkan sebuah teknik ialah melakukan proses studi pustaka, melakukan proses observasi, melakukan proses wawancara, dan melakukan proses dokumentasi. Dalam penelitian ini maka ditemukan sebuah teknik keabsahan data yang diimplementasikan ialah teknik triangulasi yang diketahui paling banyak diterapkan oleh pihak peneliti ialah melakukan proses pemeriksaan lewat sumber lainnya.

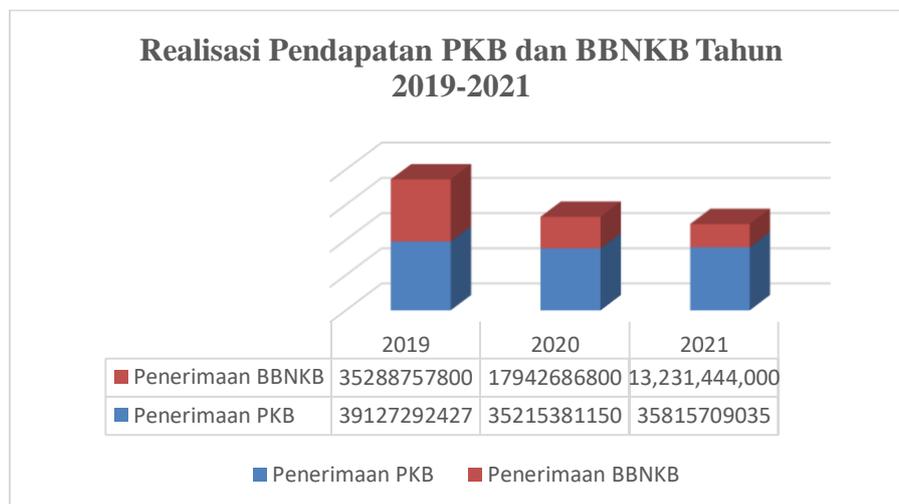
### **Hasil dan Pembahasan**

Secara data yang bersifat secara Nasional, maka terlihat banyaknya jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan pada tiap-tiap tahunnya terutama pada kendaraan sepeda motor. Pada gambar menunjukan sebuah data yang berhasil diperoleh dari UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli (SAMSAT BANGLI) - BAPENDA Bali bahwa banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang tepatnya berada di Kabupaten Bangli dari tahun ke tahun telah berhasil untuk ketahuinya telah mengalami kondisi terjadinya sebuah peningkatan yang begitu dirasakan signifikan dengan seiring dengan banyaknya jumlah penduduk dan dengan seiring dengan banyaknya jumlah banyaknya aktivitas dalam aspek ekonomi, banyaknya aktivitas dalam aspek perdagangan, banyaknya aktivitas dalam aspek jasa, dan banyaknya aktivitas dalam aspek sebagainya. Walaupun di tengah masa pandemi. Populasi kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli pada tahun 2019 banyaknya mencapai angka 121.906 unit, yang dalam kondisi ini telah berada dalam kondisi yang telah mengalami proses peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 menjadi banyaknya mencapai angka 125.940 unit atau telah

terjadi proses peningkatan banyaknya mencapai angka 40 persen dan yang terjadi pada tahun 2021 telah terjadi proses peningkatan banyaknya mencapai angka 128.690 unit atau telah terjadi proses peningkatan banyaknya mencapai angka 28 persen.



(Sumber: Data Diolah, 2022)



(Sumber: Data Diolah, 2022)

Berhubungan dengan insentif, pendapatan PKB dan BBNKB Provinsi Bali Kabupaten Bangli memberikan peningkatan terhadap penerimaan PAD. Dampak dari kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dengan pendapatan yang terus bertambah dan dalam kondisi ini telah terlihat sudah berhasil mencapai target-target yang telah dirancang atau telah ditentukan sebelumnya.

Faktor-Faktor yang mampu memberikan kontribusi pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak

Dapat untuk diketahui bahwa yang menjadi salah satu pajak dengan mampu memberikan peluang atau dengan mampu memberikan potensi dalam kontribusi penerimaan terbesar ialah dalam aspek sektor pajak yang jenis pajaknya ialah kendaraan bermotor. Dengan kondisi tersebut, maka pajak jenis kendaraan memunculkan perannya yang begitu esensial bagi kehidupan masyarakat guna memberikan dukungan pada proses terjadinya

pertumbuhan pada aspek ekonomi yang ada pada di suatu daerah. Kondisi yang terjadi ini telah mampu merujuk pada angka tingginya atas kepemilikan kendaraan bermotor yang ada pada kawasan wiayah di Indonesia, dan tidak terkecuali kondisi ini juga muncul pada kawasan wilayah Provinsi Bali secara khususnya ada pada kawasan wilayah Kabupaten Bangli. Namun jumlah penerimaan di UPTD PPRD tidak sebanding dengan jumlah angka kepemilikan kendaraan, yang dimana dalam kondisi ini telah muncul makna bahwa kesadaran yang muncul pada masyarakat yang dinilai sebagai wajib pajak tersebut masih berada dalam kondisi yang begitu sangat rendah. Maka kondisi ini telah selaras dengan penelitian ini dengan adanya sebuah perolehan hasil wawancara yang telah berhasil di lakukan dengan masyarakat yang dinilai sebagai wajib pajak bahwa wajib pajak jenis kendaraan bermotor yang secara tepat berada dalam wilayah kawasan di Kabupaten Bangli masih berada dalam kondisi yang rendah dimana kondisi yang terjadi ini muncul karena kurangnya pemahaman dan muncul karena kurangnya bukti yang bersifat secara nyata.

Aspek yang dinilai sebagai faktor yang mampu memberikan kontribusi pada sikap kepatuhan pajak yang muncul dari wajib pajak dengan jenis kendaraan bermotor ialah aspek yang mencakup ketidakstabilan yang terjadi pada perekonomian masyarakat, aspek yang mencakup kurangnya pemahaman, aspek yang mencakup kurangnya rasa sadar masyarakat akan begitu pentingnya peran yang dimunculkan oleh pajak bagi proses kelancaran pembangunan daerah dan bagi status kendaraan.

Dengan munculnya pelaksanaan insentif jenis pajak kendaraan bermotor diketahui tanpa bisa secara terus menerus berjalan dengan lancar tanpa bisa secara terus menerus berjalan tanpa munculnya aspek yang menjadi hambatan. Maka dengan kondisi yang terjadi tersebut, maka diketahui munculnya upaya-upaya yang mampu dilakukan guna memberikan bantuan pada proses kelancaran pada pelaksanaan dari adanya pemberian insentif pajak kendaraan bermotor. Namun dalam kondisi ini masih ditemukan aspek yang menjadi hambatan yang akan menjadi hal yang harus dihadapi.

#### Strategi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Mencapai Target Pajak Kendaraan Bermotor

Menyikapi aspek yang menjadi hambatan yang terjadi dalam proses melakukan kegiatan pemungutan pajak jenis kendaraan bermotor yang dilakukan proses kegiatannya pada masa terjadinya kondisi pandemi *Coronavirus Disease* tahun 2020, maka diketahui UPTD PPRD yang ada pada Provinsi Bali melakukan berbagai macam jenis usaha atau berbagai macam jenis guna memberikan sebuah dukungan pada proses kegiatan pemungutan pajak jenis kendaraan bermotor yang dalam kondisi ini telah diselaraskan dengan adanya sebuah aturan Pergub. Pembebasan pokok pajak serta adanya penghapusan sanksi bagian administrasi berupa adanya bunga dan bagian administrasi berupa adanya denda terhadap pajak jenis kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, kondisi ini terjadi dengan maksud guna memberikan keringanan pada beban masyarakat dan sebagai umpan balik bagi pemerintah. Walaupun kebijakan ini berlaku sementara agar masyarakat mau membayar pajak atas kendaraan yang dimilikinya

Proses analisis yang ada pada bagian di atas mampu memunculkan bahwa kebijakan pada aspek pemberian sebuah insentif pajak jenis kendaraan bermotor yang dalam kondisi ini telah selaras dengan adanya sebuah aturan pada Pergub yang dalam kondisi ini sudah diketahui cukup mampu memenuhi berbagai maca yang dinilai sebagai kriteria atas keberhasilan target yang telah ditentukan sebelumnya mampu untuk dicapai. Berbagai macam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UPTD PPRD yang ada di Provinsi Bali yang secara tepatnya berada di kawasan wilayah Kabupaten Bangli untuk melakukan proses efektif pada aspek kebijakan atas pembebasan denda pajak jenis kendaraan bermotor lewat adanya kegiatan sosialisasi dan lewat adanya kegiatan program pelayanan yang berhasil ditawarkan terlihat sudah cukup mampu memberikan hasil yang baik. Adanya proses kegiatan inovasi dengan melakukan sebuah kerjasama dengan antar para intansi desa, maka dalam kondisi ini juga akan terjadinya penambahan suara atau akan terjadinya penambahan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana caranya melakukan proses pembayaran pajak jenis kendaraan bermotor. Sebagian dari upaya-upaya yang telah dilakukan, maka diketahui juga upaya-upaya tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun dalam

kondisi ini ada baiknya sebuah kebijakan- kebijakan yang mana pada kesempatan ini agar diimplementasikan dengan secara kembali agar masyarakat lebih memahaminya dan mampu memunculkan rasa sadar dalam melakukan proses pembayaran pajak jenis kendaraan bermotornya.

#### Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Tahun 2019-2021

Merujuk pada data yang ada pada tahun 2019, dimana dalam kondisi ini sebuah realisasi penerimaan Pajak jenis Kendaraan Bermotor (PKB) telah berada dalam kondisi yang stabil dan telah mampu berada dalam perolehan hasil yang melebihi dari sebuah target yang telah ditentukan sebelum, sementara data yang ada pada tahun 2020 sampai pada tahun 2021 muncul realisasi pendapatan pajak yang ada di kantor Samsat Kota Bangli mampu melampaui target yang ditentukan di tengah-tengah keterpurukan keadaan ekonomi dengan pemberian insentif, sehingga adanya sedikit peningkatan pada penerimaan jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pada tahun 2019, terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak jenis Kendaraan Bermotor (PKB) berada dalam kondisi yang stabil dan berada dalam kondisi yang mampu melebihi dari target yang seharusnya wajib untuk dicapai yang telah ditentukan sebelumnya, sementara yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 maka terlihat realisasi dari pendapatan pajak yang ada di kantor Samsat yang ada pada kawasan wilayah Kota Bangli mampu berada dalam kondisi yang melampaui target yang seharusnya dan telah ditentukan di tengah-tengah terjadinya keterpurukan kondisi ekonomi dengan adanya proses pemberian insentif, sehingga muncul adanya sedikit pertumbuhan pada peningkatan yang terjadi pada penerimaan Pajak jenis Kendaraan Bermotor.

Diketahui bahwa pada tahun 2019 sebelum munculnya kondisi terjadinya pandemi terlihat dalam perolehan penerimaan BBNKB telah berada mampu dalam kondisi yang mencapai target yang seharusnya yang sudah ditentukan sebelumnya untuk jenis kendaraan dalam kategori masih baru dan BBN II. Aspek dari faktor yang mampu memberikan kontribusi terjadinya pertumbuhan secara meningkatkan pada perolehan penerimaan pajak ialah terjadinya penjualan kendaraan yang berkategori baru yang berada dalam kondisi yang meningkat. Kondisi ini muncul sebab kondisi pada aspek ekonomi terlihat masih dalam kondisi yang stabil sehingga begitu banyak masyarakat yang memunculkan rasa ingin dan rasa tertarik untuk melakukan proses pembelian kendaraan yang berkategori baru. Dalam data yang ada pada tahun 2020 dan dalam data yang ada pada tahun 2021 maka perolehan penerimaan BBNKB telah berada dalam kondisi yang mengalami sebuah penurunan sebab dalam kondisi ini pihak informan telah menyampaikan hasil dari perolehan penjualan kendaraan jenis kategori baru telah berada dalam kondisi yang mengalami penurunan dengan begitu secara drastis sementara pada penjualan pada kendaraan dengan jenis kategori bekas telah mengalami sedikit pertumbuhan naik. Dalam kondisi ini didukung dengan adanya perolehan penerimaan BBN II yang mampu memperlihatkan kendaraan jenis kategori bekas bekas sedikit mengalami kondisi kenaikan pada penjualannya. Diketahui pada masa pandemi maka banyak lapisan dari kalangan masyarakat secara khususnya yang berada dalam kawasan wilayah Bangli telah melakukan proses kegiatan pembelian kendaraan jenis kategori bekas sebagai sebuah cara atau sebagai sebuah alternatif sebab dalam proses pembelian kendaraan jenis kategori bekas baru dirasa cukup harganya mahal bagi sebagaimana kalangan masyarakat yang berada pada pedesaan maupun sebagaimana kalangan masyarakat yang berada pada perkotaan.

#### Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberlakuan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Persepsi masyarakat yang dinilai sebagai wajib pajak secara global mengenai rasa sadar yang muncul dari masyarakat dalam melakukan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor yang secara khususnya masyarakat yang dinilai sebagai wajib pajak yang berada di pedesaan masih terlihat minim, Kondisi yang terjadi ini memunculkan kontribusi pengaruh terhadap aspek perolehan pendapatan daerah yang ada pada kawasan wilayah kota Bangli. Kesadaran dari masyarakat yang dinilai sebagai wajib pajak memperoleh kontribusi pengaruh

oleh beberapa aspek faktor, salah satu yang dinilai sebagai aspek faktor yang secara utamanya ialah mencakup aspek faktor ekonomi seperti aspek faktor kebutuhan makan dan aspek faktor pendapatan sehari-hari yang dinilai terbatas, terlebih yang terjadi di tahun-tahun ini sangat terasa dampaknya akibat dari munculnya kondisi adanya kondisi pandemi. Dalam kondisi ini masyarakat juga tanpa menjadikan sebuah budaya dalam melakukan proses pembayaran pajak sehingga orang yang mempunyai sikap malas melakukan proses pembayaran pajak. Kebijakan pada aspek terjadinya pemutihan pajak ini dianggap sebagai suatu kebijakan yang diharapkan mampu memunculkan terjadinya kondisi peningkatan pada rasa sadar dari para masyarakat yang dinilai sebagai wajib pajak khususnya jenis kendaraan bermotor. Kesadaran melakukan proses pembayaran pajak secara khusus jenis pajak kendaraan bermotor sangat memiliki peran yang sangat esensial guna melakukan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak khususnya jenis kendaraan bermotor. Kesadaran melakukan proses pembayaran pajak yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya potensi pajak yang tanpa mampu untuk dijaring.

Berlandaskan pada perolehan dari hasil wawancara yang telah berhasil dilakukan oleh pihak peneliti, maka masyarakat sangat terbantu dengan munculnya program pemutihan ini, sehingga kendaraan bermotornya dapat diaktifkan kembali masanya melakukan proses pembayaran pajak yang telah menunggak tanpa adanya denda dalam pembayaran ini.

Berlandaskan pada perolehan dari hasil wawancara yang telah berhasil dilakukan oleh pihak peneliti, maka masyarakat sebagian besar yang menjadi wajib pajak telah mengetahui dan telah mengerti terkait mengenai kewajibannya yang harus dipenuhinya dalam melakukan proses pembayaran pajak sesuai ketentuan. Namun muncul ada juga beberapa masyarakat yang sebagai wajib pajak yang hanya sekedar mengetahui dan hanya sekedar mengerti bahwa pajak itu adanya suatu kewajiban tanpa mengetahui bagaimana sebenarnya ketentuan yang ada di dalamnya serta bagaimana sebenarnya fungsi dari pajak tersebut.

### **Simpulan dan Saran**

Faktor yang mampu memberikan kontribusi pengaruh pada kesadaran masyarakat yang dinilai sebagai wajib pajak ialah masalah keuangan atau masalah dalam kondisi ekonomi. Menyikapi sebuah hambatan- hambatan yang terjadi dalam melakukan proses pemungutan pajak jenis kendaraan bermotor yang telah terjadi pada kondisi masa pandemi *Coronavirus Disease* tahun 2020, maka UPTD PPRD Provinsi Bali melakukan berbagai macam upaya-upaya guna memberikan dukungan kegiatan pemungutan pajak ialah penerapan strategi insentif pajak jenis kendaraan bermotor. Masyarakat yang dalam kondisi ini menunggak pajaknya akan memperoleh sebuah pembebasan sanksi bagian administrasi, namun akan memunculkan kondisi terjadinya kecemburuan bagi masyarakat yang mempunyai sikap rajin dalam memenuhi setiap kewajiban yang seharusnya.

Berlandaskan pada perolehan dari hasil melakukan proses analisis maka simpulan akhir ialah bahwa adanya sebuah pemerian insentif Pajak jenis Kendaraan Bermotor (PKB) yang terjadi pada kondisi selama pandemi Covid 19 akan memunculkan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui bahwa insentif pajak jenis kendaraan bermotor yang diberikan oleh pemerintah akan memunculkan kontribusi pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga dalam kondisi ini akan mampu menimbulkan kondisi terjadinya pertumbuhan pada aspek penerimaan pajak kendaraan bermotor. Maka masyarakat sangat terbantu dengan munculnya program pemutihan ini, sehingga kendaraan bermotornya dapat diaktifkan kembali masanya melakukan proses pembayaran pajak yang telah menunggak tanpa adanya denda dalam pembayaran ini.

Berlandaskan pada uraian dari bagian simpulan yang telah berhasil untuk dipaparkan, maka ditemukan beberapa hal yang dinilai esensial yang mampu untuk dijadikan masukan bagi pihak-pihak terkait. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali khususnya UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli, diharapkan dapat mengoptimalkan secara rutin memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pajak, sistem pemungutan, manfaat pajak serta insentif pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak agar mereka mengetahui apa itu insentif pajak kendaraan bermotor. Menyediakan program razia pajak jenis kendaraan bermotor, yang

dalam kondisi ini terutama pada kawasan di daerah-daerah pedesaan guna melakukan sebuah peningkatan pada kesadaran masyarakat dalam melakukan proses pembayaran pajaknya.

### Daftar Rujukan

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved June 13, 2022, from [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/5100/api\\_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da\\_10/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/5100/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/1)
- Christina Irwati Tanan, K. A. D. (2021). *Journals of Economics Development Issues ( JEDI ) Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum*. 4(1), 377–389.
- H Kara, O. A. M. A. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Hoffmann. (2009). Metode Penelitian. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(9), 1689–1699. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- IMANIA WIGGA PRATIWI. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam. *Skripsi*.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2022). 10 Provinsi dengan Jumlah Sepeda Motor Terbanyak. *Dkatadata*, 2022. <https://oto.detik.com/motor/d-5358321/10-provinsi-dengan-jumlah-sepeda-motor-terbanyak-nomor-1-bukan-jakarta>